

PENYEBARAN FLU BURUNG PADA TERNAK ITIK DAN PERKIRAAN DAMPAK SOSIAL EKONOMI: BELAJAR DARI KASUS FLU BURUNG PADA AYAM

Nyak Ilham

*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. A Yani No. 70, Bogor 16161
ny4kilham@yahoo.com*

(Makalah masuk 14 April – Diterima 15 Juni 2013)

ABSTRAK

Penyakit flu burung yang menyerang ternak itik menepis anggapan selama ini yang menyatakan bahwa ternak itik kebal terhadap penyakit flu burung. Belajar dari pengalaman penyakit flu burung yang menyerang unggas pada 2004-2005, maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran penyakit flu burung pada itik. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola usaha dan perdagangan itik terkait dengan penyebaran penyakit flu burung serta memperkirakan dampak sosial ekonomi penyakit flu burung terhadap peternakan itik di Indonesia. Pola pemeliharaan itik yang sebagian besar masih ekstensif dan semi intensif berpeluang besar terjadi transmisi penyakit antar itik dan unggas liar di lapangan. Perdagangan ilegal di daerah lintas batas dan impor dari negara yang melakukan re-ekspor juga berpotensi sebagai jalur masuknya virus flu burung ke Indonesia. Perdagangan itik antar daerah melalui jalur darat yang sulit dikontrol juga berpotensi sebagai media penyebaran virus ke daerah yang lebih luas. Dampak ekonomi penyakit flu burung pada usaha ternak itik muncul akibat kematian dan penurunan produksi serta hilangnya kesempatan kerja, dimana penurunan permintaan tidak berdampak secara signifikan. Peternak itik skala kecil yang terpuruk akibat wabah flu burung memerlukan bimbingan teknis dan akses pembiayaan untuk kembali berusaha. Ke depan pengembangan usaha peternakan itik sebaiknya diarahkan pada usaha semi intensif dan intensif untuk mencegah dan mengendalikan terjadinya wabah penyakit.

Kata kunci: Flu burung, itik, dampak, sosial ekonomi

ABSTRACT

SPREADING OF AVIAN FLU ON DUCK AND ITS IMPACT ON SOCIAL ECONOMY: LESSON LEARNT FROM AVIAN FLU CASES ON CHICKEN

Bird flu disease that attacks duck dismissed the notion of duck immune to bird flu disease. Learning from the experience of bird flu disease that attacks poultry in the year of 2004-2005, necessary to measure the spread of disease prevention bird flu in ducks. This paper aims to describe the business and trade patterns of duck associated with the spread of avian influenza and predict the socio-economic impact of bird flu on duck farms in Indonesia. Duck rearing patterns mostly are in the extensive and semi-intensive system, that have large potential disease transmission occurred between duck and wild. Illegal trade in the cross-border region and imports from countries that re-export it, is also become potential as well as the entry point to the bird flu virus in Indonesia. Ducks trade between regions by land transportation is difficult to control as well becomes the potential media to spread of the virus to a wider area. The economic impact of bird flu on duck business occurred due to the death of ducks, decline in production and loss of job opportunities, while that on demand reduction was not significant. Small scale farmers that were bankrupt as a result of bird flu outbreaks may require technical assistance and access to capital for recovery. In the future, development of ducks business should be directed at duck farms into a semi-intensive and intensive system to facilitate the control of epidemic diseases.

Key words: Bird flu, ducks, impact, social economic

PENDAHULUAN

Pada bulan Oktober 2012 dilaporkan bahwa penyakit flu burung telah menyerang ternak itik di Indonesia. Hingga 31 Maret 2013, daerah yang tertular terus menyebar di 16 provinsi pada 104 kabupaten/kota (Ditjen PKH 2013), yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa

Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur dan Papua. Kejadian ini tentunya diluar dugaan para ahli, karena selama ini dianggap bahwa itik kebal terhadap penyakit flu burung yang disebabkan oleh virus Avian Influenza (AI). Asmara (2012) menyatakan bahwa kasus kematian massal pada ternak itik sebagian besar

disebabkan oleh virus AI sub-tipe H5N1 *clade* 2.3.2.1. Virus *clade* ini bukan merupakan hasil mutasi dari virus AI *clade* 2.1 yang sebelumnya sudah mewabah di Indonesia. Hal yang sama dilaporkan oleh Dharmayanti (2013), bahwa kematian pada itik tersebut disebabkan oleh adanya introduksi virus *Avian Influenza clade* 2.3.2., namun dapat juga disebabkan oleh virus AI *clade* 2.1.3. Hal ini menunjukkan bahwa virus AI H5N1 masih bersirkulasi di Indonesia dan tetap menjadi ancaman bagi ternak unggas pada umumnya maupun manusia.

Menurut Hewajuli (2012), unggas air termasuk itik, diduga sebagai inang perantara alami virus influenza A yang paling heterogen, sehingga semua subtipe virus AI berkembangbiak dalam jumlah besar di dalam saluran pencernaan unggas air. Di dalam tubuh itik, virus flu burung yang bersifat *Low Pathogenic Avian Influenza* (LPAI) dapat berubah menjadi *Highly Pathogenic Avian Influenza* (HPAI) melalui proses evolusi atau adaptasi dalam tubuh itik. Virus flu burung yang sudah mengalami perubahan dalam tubuh itik akan bersifat sangat patogen atau berbahaya pada peternakan itik dan dapat menyebabkan kematian. Perilaku hidup berpindah, habitat hidup dekat perairan umum dan pola pemeliharaan digembala berpotensi besar untuk menyebarkan virus flu burung dari itik ke lingkungan disekitarnya.

Untuk menghindari penyebaran yang lebih luas, seharusnya ada saling ketergantungan antar daerah dan antar negara dalam pengaturan produksi peternakan, perdagangan, dan kesehatan (Lokuge dan Lokuge 2005). Pengalaman saat terjadi wabah flu burung pada unggas pada tahun 2004-2005, bahwa pengaturan pada kegiatan perdagangan sangat sulit dilakukan, walaupun upaya untuk melaksanakannya itu telah diupayakan oleh pemerintah.

Populasi itik di Indonesia pada tahun 2011 mencapai 49,4 juta ekor, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan populasi ayam buras sebesar 275

juta ekor dan ayam ras sebanyak 1,15 milyar ekor (Ditjen PKH 2011). Pola pemeliharaan itik beragam dari ekstensif, semi intensif hingga intensif (Yusdja et al. 2005). Selanjutnya Rusfidra (2008) menyatakan bahwa usaha itik masih didominasi oleh peternakan skala kecil, bersifat tradisional ekstensif dengan keterampilan peternak yang rendah dan modal kecil. Pola pemeliharaan dan perdagangan antar daerah yang ada dikhawatirkan dapat menyebarkan penyakit flu burung pada itik ke daerah yang lebih luas. Jika hal itu terjadi dikhawatirkan akan memberikan dampak kerugian ekonomi yang lebih besar, bahkan dapat menular kepada manusia.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola pemeliharaan itik dan perdagangan serta telur itik kaitannya dengan penyebaran penyakit flu burung serta memperkirakan dampak sosial ekonomi penyakit ini terhadap usaha peternakan itik di Indonesia. Data dan informasi yang digunakan bersumber dari ulasan hasil-hasil penelitian terdahulu yang dilengkapi dengan data sekunder dan informasi terkait. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi opsi/alternatif rekomendasi untuk pengambilan kebijakan pengendalian flu burung dan pengembangan usaha itik kedepan.

SENTRA PRODUKSI DAN POLA USAHA PEMELIHARAAN

Populasi itik tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 5,7 persen selama tahun 2007-2012 (Tabel 1). Pada sentra produksi utama pertumbuhan populasi itik umumnya cukup baik, kecuali di Sumatera Utara. Usaha peternakan itik didominasi oleh skala kecil dengan pola pemeliharaan semi intensif dan ekstensif. Dengan pola demikian, keberadaan usaha itik umumnya berlokasi di daerah dekat perairan seperti persawahan, sungai, rawa, dan pantai.

Tabel 1. Pertumbuhan populasi itik pada sentra produksi di Indonesia, 2007-2012 (000 ekor)

Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	R (%/tahun)
Jawa Barat	6535	7962	8192	9871	9311	10230	9,9
Jawa Tengah	4542	4531	4848	5006	5451	5955	5,6
Kalimantan Selatan	3771	4138	4158	4354	4488	4639	4,3
Jawa Timur	2465	4345	3633	3688	3884	3943	13,6
Sulawesi Barat	1799	1872	2127	2517	942	1012	-3,8
Aceh	2331	2597	2710	3015	2329	2443	1,8
Sulawesi Selatan	1036	2468	2756	3144	3426	3581	35,5
Banten	1279	1617	1698	2157	2226	2309	13,1
Sumatera Utara	3361	2165	2185	2026	2627	2656	-2,2
Sumatera Barat	1006	1055	1106	1148	1123	1202	3,7
Lainnya	7742	7090	7263	7376	7681	9020	3,4
Indonesia	35867	39840	40676	44302	43488	46990	5,7

Sumber: Ditjen PKH (2011; 2012)

Pada usaha itik petelur, pola pemeliharaan ekstensif masih banyak dijumpai baik di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa dengan tujuan utama untuk menghemat biaya pakan. Pada masa-masa itik belum menghasilkan telur, peternak menggembalakan itiknya di areal persawahan, rawa, atau perairan umum lainnya (Gambar 1), sehingga itik mendapatkan pakan dari alam baik dalam bentuk protein (cacing dan siput) dan karbohidrat (butiran padi dan hijauan lainnya) yang cukup. Selain itu dengan pemeliharaan pola ekstensif itik, bebas melakukan pergerakan (*exercise*) sehingga perkembangan organ tubuh, terutama saluran reproduksi menjadi lebih baik. Namun perlu diperhatikan bahwa pola pemeliharaan itik yang seperti ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bertahan dan menyebarnya penyakit flu burung pada unggas di Thailand pada tahun 2004 (Gilbert et al. 2006).



Gambar 1. Usaha peternakan itik petelur pola ekstensif/semi intensif

Pada usaha itik pedaging, pola pemeliharaan pada umumnya dilakukan secara intensif, sehingga peningkatan bobot badan diperoleh lebih cepat. Dengan waktu pemeliharaan selama dua bulan, diharapkan itik sudah mencapai bobot 1,1-1,3 kg/ekor pada saat panen (Gambar 2).

Konsumen di beberapa daerah, seperti Kalimantan Selatan contohnya, dengan alasan rasa, konsumen lebih menyukai telur itik yang dihasilkan dari usaha pola ekstensif ini. Demikian juga konsumen daging itik ada yang menyukai itik dengan komposisi daging berkadar lemak tinggi dan kadar lemak rendah. Sebagai contoh, konsumen daging itik di Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah lebih menyukai itik dengan kandungan lemak sedikit. Daging itik yang demikian, tidak diperoleh dari usaha yang intensif tetapi dari itik yang dipelihara secara ekstensif dan semi intensif.



Gambar 2. Usaha peternakan itik pedaging pola intensif

Pada daerah-daerah dengan pola ekstensif, peluang ternak itik bertemu dengan unggas liar sangatlah besar. Dengan kondisi yang demikian maka transmisi penyakit antar itik dan unggas liar sangat mungkin terjadi dan mudah tersebar ke daerah yang lebih luas. Pola pemeliharaan semi intensif dan ekstensif juga menyulitkan pelaksanaan program vaksinasi.

Sebagai perbandingan, pada usaha ayam pedaging sektor-3 di Jawa Barat, kemauan peternak melakukan vaksinasi untuk mencegah penyakit flu burung masih rendah. Sebaliknya, untuk usaha ayam petelur, karena investasi yang lebih besar dan siklus produksi relatif panjang, sehingga untuk menghindari risiko umumnya peternak ayam petelur melakukan vaksinasi (Ilham dan Iqbal 2011).

Ilham et al. (2013) mengemukakan di Kabupaten Subang bahwa walaupun peternakan ayam pedaging di sektor-3 belum pernah terserang flu burung, namun program vaksinasi tetap dilakukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar jika terjadi kasus flu burung. Sementara itu, peternakan ayam petelur jantan sektor-3 di Kabupaten Ciamis yang juga belum pernah terserang flu burung peternak tidak melakukan vaksinasi AI karena akan menambah biaya produksi. Hasil observasi pada kedua lokasi, nilai biosekuriti di Kabupaten Subang 18, dan nilai biosekuriti di Kabupaten Ciamis antara 7,4-9,97 jauh di bawah standar nilai maksimal yaitu 42, sehingga tidak dapat diandalkan untuk mencegah ayam terserang virus AI.

Berdasarkan kasus pada ayam ras tersebut, maka dapat ditarik pelajaran bahwa pada usaha itik pedaging dengan masa pemeliharaan sekitar dua bulan, penerapan biosekuriti lebih baik dilakukan. Sebaliknya pada itik petelur dengan masa produksi panjang dan pemeliharaan yang digembalakan dimana penerapan biosekuriti sulit diaplikasikan maka vaksinasi perlu dilakukan untuk menghindari kematian dan penurunan produksi akibat adanya wabah flu burung.

PERDAGANGAN INPUT DAN OUTPUT**Impor**

Jalur perdagangan impor itik dapat merupakan jalur masuk penyakit flu burung ke Indonesia. Data statistik impor Indonesia menunjukkan selama periode lima tahun (2007-2011) Indonesia tidak melakukan impor itik hidup. Produk itik yang diimpor utamanya adalah berupa potongan daging dan oval itik (beku). Selain itu dalam jumlah kecil dan tidak rutin, Indonesia juga mengimpor produk itik dalam bentuk hati (*fatty liver*) dan angsa (dingin), serta potongan lain itik dan angsa (beku). Tabel 2 menunjukkan perkembangan impor bulanan Indonesia untuk daging dan oval itik/angsa dalam bentuk beku dan dingin secara agregat terus mengalami penurunan.

Menurut Agustiono (2013) virus flu burung pada itik masuk melalui impor bibit itik, namun tidak disebutkan dari negara mana asal bibit itik tersebut dan belum dikaji secara ilmiah. Menurut Asmara (2012) dan Nidom *dalam* BBC (2012), virus H5N1 *clade* 2.3.2

dilaporkan sudah menyebar sejak 2010 di Nepal, India, Bangladesh, Pakistan dan China hingga ditemukan pada itik di Fukushima Jepang pada tahun 2011. Karena itu pemerintah diminta memperketat impor itik dari China.

Pada November 2012, puluhan ribu unggas mati di Australia akibat flu burung dan Australia dituding sebagai penyebar flu burung ke Indonesia (Tono 2012). Namun tuduhan tersebut dilemahkan oleh Iwantoro yang mengatakan bahwa Indonesia tidak pernah mengimpor unggas hidup dari Australia (BBC 2012). Indonesia selama ini hanya mengimpor produk turunan unggas dari Australia seperti tepung tulang, tepung kulit serta tepung darah dalam jumlah kecil (Erabaru New 2012). Selain itu, virus flu burung yang merebak di Australia termasuk tipe H7N7, berbeda dengan virus yang menyerang itik di Indonesia. Untuk menghindari masuknya virus tipe baru itu, dan adanya kasus flu burung pada itik di Indonesia, pemerintah melarang masuk produk tersebut ke Indonesia yang dikapalkan setelah 9 November 2012.

Tabel 2. Volume impor daging dan oval itik dan angsa ke Indonesia, 2007-2011

Tahun/bulan	Produk (kg)			Negara asal
	Daging dan oval itik (beku)	Hati itik dan angsa (dingin)	Bentuk daging dan oval itik dan angsa (beku)	
2007	1.008.643	0	0	Malaysia, US, Australia
2008	859.442	0	0	Malaysia, US
2009	757.081	0	0	Malaysia, US, Singapura
2010	523.202	0	114.583	Malaysia, US, Australia
2011				
Januari	115.259	0	18.100	ta
Februari	47.119	0	0	ta
Maret	24.380	0	0	ta
April	57.658	0	0	ta
Mei	63.557	0	0	ta
Juni	58.362	3.460	0	ta
Juli	0	0	0	ta
Agustus	44.322	0	0	ta
September	29.718	0	0	ta
Oktober	24.738	0	0	ta
November	0	0	0	ta
Desember	47.937	0	0	ta
Jumlah 2011	513.050	3.460	18.100	ta

ta = tidak ada data

Sumber: BPS (2011)

Jika dilihat dari negara asal (Tabel 2), produk itik yang diimpor oleh Indonesia berasal dari Malaysia, Amerika Serikat, Australia dan Singapura. Jika hasil laporan menunjukkan bahwa kasus flu burung pada itik banyak terjadi di China (Naipospos 2013), maka secara historis Indonesia tidak melakukan impor itik dan produknya dari China. Ini berarti dugaan penularan flu burung pada itik melalui impor itik dan produk itik dari China menjadi lemah. Namun perlu diamati dan diwaspadai lebih lanjut, apakah produk itik yang di impor dari Malaysia dan Singapura tersebut merupakan kegiatan reekspor yang berasal dari China. Virus yang menyerang ternak itik ini masuk ke Indonesia diperkirakan menjelang pertengahan hingga akhir tahun 2012. Diduga kuat masuknya virus *clade 2.3.2.1* dibawa oleh burung liar yang bermigrasi dari Asia ke pantai-pantai di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, masuknya virus ini akibat adanya perdagangan antar negara yang tidak terdeteksi membawa virus AI.

Kegiatan impor dapat juga dilakukan secara ilegal sehingga tidak tercatat dalam statistik. Perbedaan harga dan ketersediaan produk unggas di kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dengan Sabah dan Serawak Malaysia menyebabkan masuknya produk unggas dari Malaysia ke Indonesia (ICASEPS 2010). Pengamatan lapang di pasar diantara produk unggas yang dimasukkan dari Tawau ke Sebatik dan Nunukan adalah daging itik beku yang berlemak dan kulit tebal. Pengamatan langsung di pelabuhan Nunukan juga terlihat ada penumpang yang turun dari kapal membawa ayam aduan dari Malaysia yang dikenal dengan ayam Filipina. Kondisi perbatasan Indonesia dengan negara tetangga saat ini, masih sulit menghindari masuknya produk-produk unggas secara ilegal yang dapat mengancam kesehatan unggas di dalam negeri. Namun hingga kini tidak ada laporan resmi kasus flu burung pada ternak itik di kawasan perbatasan Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.

Antar daerah

Peningkatan pendapatan masyarakat dan gaya hidup menyebabkan permintaan terhadap produk itik dengan variasi penyajian juga meningkat di berbagai daerah. Untuk memenuhi permintaan tersebut, produk usaha ternak itik yaitu itik bibit, itik potong dan telur dari daerah sentra produksi banyak diperdagangkan ke berbagai daerah. Penyebaran flu burung di dalam negeri dapat melalui pergerakan itik dan produknya melalui kegiatan perdagangan. Saat ini diantara 10 sentra produksi utama, pada delapan provinsi ternak itik sudah tertular penyakit flu burung, yaitu provinsi: Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Banten, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Tabel 1).

Yusdja et al. (2005) menunjukkan bahwa sebagian besar peternak itik mengadakan bibit dari hasil pembelian. Bibit itik yang dibeli berupa itik umur sehari (DOD), itik dara dan itik dewasa (Tabel 3). Perdagangan bibit itik ini mencakup daerah yang luas. Kasus peternak itik di Sebatik Nunukan, Kalimantan Timur, untuk usaha budidaya dan pengolahan telur asin, peternak membeli bibit berupa DOD dari Mojokerto, Jawa Timur.

Tabel 3. Distribusi responden menurut sumber pengadaan bibit, 2005 (%)

Sumber bibit	Jawa Tengah		Jawa Timur	
	Brebes	Tegal	Blitar	Mojokerto
Menetaskan sendiri	6,7	0,0	0,0	25,0
Beli anakan (DOD)	73,3	16,7	8,3	8,3
Beli itik dara	20,0	83,3	91,7	83,3
Beli itik dewasa	6,7	0,0	0,0	8,3

Sumber: Yusdja et al. (2005)

Output usaha itik yang diperdagangkan adalah telur dan itik hidup. Selain itu ada juga produk samping berupa kotoran itik yang diperdagangkan sebagai pupuk kandang. Arah perdagangan telur dan itik hidup umumnya dari sentra produksi ke sentra konsumsi terutama Jakarta, Surabaya, Semarang, dan pasar lokal. Demikian juga dengan telur itik, selain dijual di pasar lokal juga untuk pasar luar daerah. Telur itik yang diperdagangkan untuk pasar luar kabupaten dan luar provinsi lebih banyak dalam bentuk telur asin (Bank Indonesia 2005).

Kegiatan perdagangan itik dan produknya merupakan salah satu media tersebarnya penyakit flu burung. Tabel 4, 5 dan 6 masing-masing menggambarkan daerah-daerah yang melakukan perdagangan produk itik dan daerah-daerah tertular penyakit flu burung pada ternak itik. Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 12 provinsi yang melakukan penjualan itik ke provinsi lain, tujuh diantaranya merupakan daerah tertular. Daerah-daerah ini berpotensi menyebar virus flu burung ke daerah tujuan penjualan.

Jika dihubungkan antara Tabel 4 dan 5 menunjukkan bahwa dari 23 daerah yang memasukkan ternak itik dari luar provinsi, sebelas provinsi merupakan daerah tertular flu burung. Dari sebelas provinsi yang tertular, delapan merupakan daerah pengirim dan penerima dan tiga hanya sebagai daerah penerima. Data ini mengindikasikan bahwa ada kemungkinan terjadi penyebaran flu burung melalui kegiatan perdagangan itik antar provinsi. Namun tidak

semua daerah penerima sudah tertular penyakit flu burung. Hal yang menarik adalah untuk daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, kedua daerah ini merupakan daerah tertular tetapi tidak menerima pemasukan ternak dan telur itik (Tabel 6). Jika hanya

dilihat dari aspek distribusi semata, data ini dapat menjadi langkah awal bahwa kemungkinan dapat diduga kedua daerah ini merupakan daerah sumber penularan penyakit flu burung pada itik.

Tabel 4. Perkembangan status penyakit flu dan pengeluaran ternak itik burung pada beberapa provinsi di Indonesia, 2007-2012

Provinsi	Status flu burung	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	-	0	0	0	0	143	146
Jambi	-	10	10	10	2	10	3
Sumatera Selatan	-	127	131	0	0	120	0
Bengkulu	+	5	5	8	4	4	4
Lampung	+	6	7	0	1	21	0
Jawa Barat	+	1.645	1.646	938	688	3.370	10.729
Jawa Tengah	+	4	69	455	47	1.501	245
DI Jogya	+	14	16	70	59	17	17
Banten	+	173	173	1.534	1.529	1.529	1.506
Jawa Timur	+	0	0	0	0	3	0
Bali	+	0	0	0	2	0	0
Kalimantan Selatan	-	477	0	726	1.015	622	16
Sulawesi Tengah	-	0	0	7	29	13	13
Sulawesi Selatan	+	2	0	0	0	0	0
Sulawesi Tenggara	+	0	0	0	0	4	21
Gorontalo	-	0	0	0	0	0	3
Sulawesi Barat	+	0	0	0	0	1	0
Maluku Utara	-	0	0	0	0	0	1

+ = ada; - = tidak ada

Sumber: Ditjen PKH (2011; 2012)

Tabel 5. Perkembangan status penyakit flu burung dan pemasukan ternak itik pada beberapa provinsi di Indonesia, 2007-2012

Provinsi	Status flu burung	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Aceh	-	0	0	67	70	336	342
Sumatera Barat	-	750	550	0	69	0	0
Riau	+	24	0	0	0	0	0
Jambi	-	12	0	24	34	27	35
Sumatera Selatan	-	41	0	0	0	8	0
Bengkulu	+	11	0	24	50	9	10
Lampung	+	4	0	0	76	64	45
Bangka Belitung	-	201	2.914	0	0	50	0
Kepulauan Riau	-	0	100	0	0	0	0
DKI Jakarta	+	1.460	17	2.909	3.026	3.237	3.302
Jawa Barat	+	130	156	171	172	202	273
Jawa Tengah	+	76	0	17	42	25	30
DI Jogya	+	311	0	76	430	360	365
Jawa Timur	+	0	0	0	0	0	0

Lanjutan Tabel 5.

Provinsi	Status flu burung	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Banten	+	64	0	4.716	3.397	3.397	3.329
NTT	-	0	791	0	0	0	0
Kalimantan Barat	-	5	66	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	-	0	7	0	2	1	94
Kalimantan Timur	+	64	0	9	43	91	95
Sulawesi Selatan	+	0	0	0	0	0	0
Sulawesi Tengah	-	0	0	2	24	26	7
Sulawesi Tenggara	+	0	12	0	0	34	42
Sulawesi Barat	+	0	9	1	17	7	3
Sulawesi Utara	-	0	0	0	0	7	0
Gorontalo	-	0	0	0	0	800	250

Sumber: Ditjen PKH (2011; 2012)

Tabel 6. Perkembangan pengeluaran dan pemasukan telur itik dan status penyakit flu burung pada beberapa provinsi di Indonesia, 2007-2011

Provinsi	Status flu burung	2007	2008	2009	2010	2011
Daerah pengeluaran						
Jambi	-	1.830	2.114	0	0	0
Jawa Barat	+	0	0	12.679	21.957	31.234
Jawa Tengah	+	2.442	2.687	25.628	4.116	4.124
DI Yogya	+	994	1.093	505	3.801	3.915
Sulawesi Selatan	+	33	0	0	0	0
Daerah pemasukan						
Sumatera Barat	-	0	0	0	72.239	0
Jambi	-	30.227	31.905	4.125	4.030	0
Bengkulu	+	870	957	0	0	7
DKI Jakarta	+	404.712	523.897	29.163	30.912	32.148
Jawa Barat	+	640.890	0	4.949	8.491	12.033
Jawa Tengah	+	3.084	3.392	206	16	16
DI Yogya	+	525	578	1.823	1.275	1.288
Kalimantan Tengah	-	140	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	-	0	0	0	1.065	0
Maluku	-	0	0	1.826	1.890	1.954

Sumber: Ditjen PKH (2011)

DAMPAK EKONOMI

Studi terdahulu menunjukkan bahwa wabah flu burung pada ayam menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Kerugian yang ditimbulkan ada yang langsung akibat dari kematian ternak dan penurunan produksi, serta kerugian tidak langsung akibat turunnya permintaan terhadap produk ayam (Ilham dan Yusdja

2010; You dan Diao 2007). Turunnya permintaan tersebut disebabkan oleh rasa ketakutan karena penularan penyakit flu burung kepada konsumen yang mengonsumsi produk ayam. Selain itu menurut (Obayelu 2007) kerugian ekonomi yang ditimbulkan adalah biaya untuk mengendalikan penyakit flu burung seperti pemusnahan dan disinfeksi.

Wabah flu burung yang menyerang peternakan ayam petelur di Turki menyebabkan terjadinya penurunan kapasitas produksi, pendapatan perusahaan dan keuntungan usaha masing-masing sebesar 40, 75, dan 200 persen. Sekitar 45 persen produsen berhenti berproduksi selama lima bulan dan hutang perusahaan meningkat 3-4 kali lipat karena wabah penyakit flu burung tersebut (Sariozkan et al. 2009).

Menurut Miers (2008), penyakit flu burung di Asia Tenggara menyebabkan kematian unggas jutaan ekor dan lebih dari 175 juta unggas dimusnahkan. Kerugian ekonomi secara langsung pada sektor unggas di kawasan tersebut diperkirakan mencapai US \$ 10 miliar (FAO 2004). Untuk kasus di Jawa, FKH UGM (2006) melaporkan bahwa dampak wabah flu burung menyebabkan penurunan keuntungan peternak setiap bulan untuk ayam petelur; peternak ayam pedaging; serta peternak ayam buras, itik dan puyuh masing-masing dengan kisaran antara Rp. 9.150.000-438.040.000; Rp. 9.350.000-429.860.000; dan Rp. 380.000-286.920.000.

Menurut Smith (2005) kerugian ekonomi akibat wabah flu burung mencapai 0,7 persen dari GDP dunia, sedangkan untuk negara berkembang sebesar 1,2 persen dan untuk negara di kawasan Asia-Pasifik sebesar 2,4 persen. Kerugian tersebut dihitung keseluruhan baik dari sektor unggas maupun sektor terkait lainnya. Menurut Muryani (2013), flu burung yang merebak di Indonesia berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi makro, antara lain terjadi penurunan GDP, penurunan investasi, penurunan konsumsi rumah tangga, dan kenaikan inflasi. Dampak makro ini mengindikasikan besarnya keterkaitan sektor unggas terhadap sektor ekonomi lainnya, termasuk kesempatan kerja pada masing-masing sektor ekonomi.

Kondisi wabah flu burung yang menyerang itik saat ini, sedikit berbeda dengan saat terjadinya wabah flu burung pada ayam tahun 2004-2005. Saat ini, penyakit flu burung bukan lagi merupakan hal baru bagi masyarakat dan sudah menjadi endemi. Kasus-kasus secara sporadis masih terjadi di berbagai daerah, terutama menjelang dan saat musim penghujan. Masyarakat sudah mengetahui cara-cara menghindari dari kemungkinan terinfeksi dan sudah mengetahui seberapa besar dampaknya terhadap manusia. Oleh karena itu, diduga, wabah flu burung yang menyerang itik tidak menurunkan permintaan terhadap produk itik.

Komunikasi langsung antara penulis dengan pedagang telur asin di Jakarta dan di Sebatik Kabupaten Nunukan pada awal Januari 2013 menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap telur asin tidak menurun. Namun karena serangan penyakit flu burung menyebabkan penurunan produksi telur dan kematian itik maka pasokan telur asin mengalami penurunan, sehingga harga relatif meningkat. Oleh karena itu, diduga bahwa kerugian

ekonomi akibat penyakit flu burung pada itik adalah hanya kerugian langsung akibat kematian ternak, penurunan produksi telur dan hilangnya kesempatan kerja peternak. Menurut Himpuli, hingga awal Januari 2013 kerugian ekonomi yang ditimbulkan akibat wabah flu burung pada itik di beberapa daerah di Indonesia mencapai Rp 17,5 milyar (Erabaru News 2013).

DAMPAK SOSIAL

Hasil studi terdahulu menunjukkan bahwa banyak usaha ayam yang berhenti berusaha akibat kerugian yang ditimbulkan akibat wabah penyakit flu burung pada unggas (Ilham dan Yusdja 2010). Peternak ayam saat itu sulit dan enggan untuk melakukan pemulihan usaha karena keterbatasan modal dan ketidakpastian bagaimana mengendalikan wabah. Namun karena industri ayam ras saat itu sudah berkembang baik dengan berbagai pola pengusahaan, yaitu pola mandiri dan kerjasama, maka banyak peternak mandiri yang berhenti berusaha kemudian berusaha kembali dengan mengalihkan pola pengusahaan dari pola mandiri ke pola kerjasama (kemitraan).

Berbeda dengan usaha itik, struktur industri ini belum berkembang seperti ayam ras. Peternak itik yang usahanya mengalami kebangkrutan (*collaps*) akibat wabah flu burung akan mengalami kesulitan modal dan bimbingan teknis untuk kembali berusaha. Menurut Yusdja et al. (2005) hanya sebagian kecil usaha peternakan itik yang berskala menengah ke atas. Umumnya usaha itik merupakan usaha skala kecil dengan kendala keterbatasan modal, lahan, manajemen, dan memiliki risiko bisnis. Namun pada sisi lain usaha peternakan skala kecil, seperti usaha itik, menjanjikan lapangan kerja dan mampu menekan terjadinya urbanisasi (Basuno 2008). Oleh karena itu, untuk memulihkan usaha itik diperlukan peran pemerintah dalam akses pembiayaan dan bimbingan pengendalian penyakit flu burung. Selama ini peran tersebut dinilai masih kurang, karena peternak itik dibiarkan berkreasi sendiri melakukan usaha yang optimal dengan cara meminimalkan biaya. Oleh karena itu, usaha itik dengan pola penggembalaan masih terus berkembang.

Wabah flu burung dapat juga mempengaruhi hubungan sosial antara peternak unggas dan masyarakat bukan peternak unggas yang berada di sekitar peternakan. Terganggunya hubungan tersebut dapat disebabkan akibat polusi bau dan meningkatnya populasi lalat dari kandang unggas yang sampai ke pemukiman. Hal ini juga karena ada rasa ketakutan masyarakat akibat adanya kematian manusia akibat tertular virus flu burung yang berasal dari peternakan unggas. Ilham et al. (2013) melaporkan bahwa keberadaan peternakan unggas dan dampak lingkungan yang ditimbulkan berpengaruh terhadap keeratn hubungan sosial antara masyarakat peternak dan bukan

peternak. Keeratan tersebut makin merenggang pada lokasi-lokasi peternakan yang berada di daerah *suburban*, dimana masyarakat di sekitar peternakan bersifat lebih kritis dan hubungan kekerabatan diantaranya lebih renggang dibandingkan dengan masyarakat di daerah pedesaan.

PENGEMBANGAN WILAYAH PRODUKSI

Ternak itik menyebar hampir di seluruh provinsi, namun sentra produksi itik hanya terdapat di beberapa daerah. Pemerintah telah memiliki program pengembangan unggas lokal termasuk itik yaitu *Village Poultry Farming* (VPF), Kawasan Agribisnis Unggas Lokal (KAUL), dan Penataan Kawasan (*Zooning*). Program tersebut bertujuan mengembangkan usaha unggas lokal dalam satu kawasan dengan memperhatikan daya saing, kesehatan ternak, dan kesehatan lingkungan. Untuk meningkatkan efektivitas program, implementasi program di lapangan masih perlu perbaikan, terutama penentuan daerah yang mendapat program dan pembinaan kepada peternak.

Menurut Ilham dan Yusdja (2010), kasus serangan wabah flu burung ringan terjadi pada usaha ayam pedaging dan petelur yang kandangnya berlokasi di luar halaman rumah, sedangkan kasus serangan berat banyak terjadi pada usaha yang kandangnya berlokasi di halaman rumah. Kendala keterbatasan lahan pada peternak itik tentu mempengaruhi kondisi perkandangan, sehingga pengembangan itik dalam satu kawasan membentuk kawasan produksi itik merupakan salah satu solusi untuk kendala lahan dan dapat menghasilkan produk berdaya saing dan sehat serta tidak meresahkan masyarakat non-peternak di sekitar kandang. Jika pemerintah melakukan program pemulihan usaha itik yang terserang wabah flu burung atau jika ada program yang sedang berjalan saat ini, diharapkan program tersebut akan mengalihkan pola pengusahaan itik dari ekstensif menjadi semi intensif dan intensif.

KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan sebelumnya dapat ditarik beberapa butir penting untuk program vaksinasi dan pengembangan peternakan itik kedepan, sebagai berikut:

1. Mempertimbangkan pola pemeliharaan itik yang masih ekstensif dan semi intensif, maka untuk mengendalikan wabah flu burung pada ternak itik, program vaksinasi akan lebih efektif jika dilakukan pada peternakan pembibitan yang menghasilkan DOD, bibit dara dan bibit dewasa yang akan digunakan sebagai bibit pada usaha itik petelur. Untuk usaha itik pedaging, penerapan biosekuriti masih memungkinkan dilakukan dengan tidak melakukan vaksinasi.
2. Untuk mencegah penyebaran flu burung antar provinsi, pengawasan perdagangan ternak dan telur itik melalui pelabuhan laut dan udara perlu lebih ditingkatkan, sedangkan perdagangan melalui lalulintas darat masih sulit dilakukan.
3. Berdasarkan data distribusi ternak dan telur itik dapat diduga, daerah Jawa Timur dan Sulawesi Selatan merupakan daerah sumber penularan. Oleh karena itu, kajian lebih dalam tentang penyebab awal dapat difokuskan pada kedua daerah ini.
4. Kerugian usaha ternak itik akibat flu burung merupakan kerugian langsung yang disebabkan kematian dan penurunan produksi telur itik, serta kehilangan kesempatan kerja. Untuk kasus seperti itu, pemulihannya relatif lebih cepat. Namun demikian, diperlukan peran pemerintah untuk menyediakan dana pemulihan usaha. Pemulihan usaha melalui program pemerintah hendaknya sekaligus membimbing peternak untuk mengalihkan usaha ekstensif menjadi usaha intensif dan semi intensif. Dengan cara demikian, pengendalian penyakit melalui penerapan *biosecurity* dan vaksinasi diharapkan akan menjadi lebih baik.
5. Kedepan sebaiknya usaha pengembangan peternakan itik diarahkan pada usaha semi intensif dan intensif. Dengan demikian, pengendalian wabah penyakit, termasuk flu burung lebih mudah dilakukan. Oleh karena itu, pembinaan usaha peternakan itik oleh pemerintah perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiono E. 2013. Itik impor penyebar flu burung. Jakarta (Indonesia): Harian Terbit, 10 Januari 2013. hlm. 9.
- Asmara W. 2012. Flu burung jenis baru sebabkan ribuan itik dan unggas mati mendadak. Yogyakarta (Indonesia): Rilis Universitas Gajah Mada (10 Mei 2013).
- Bank Indonesia. 2005. Pola pembiayaan usaha kecil industri telur asin. Jakarta (Indonesia): Direktorat Kredit, BPR dan UMKM, Bank Indonesia. 31 hlm. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres>.
- Basuno E. 2008. Review dampak wabah dan kebijakan pengendalian Avian Influenza di Indonesia. AKP. 6: 314-334.
- BBC. 2012. Indonesia hentikan impor unggas dari Australia. BBC-Indonesia [internet]. [sitasi 28 Juni 2013] www.bbc.co.uk.
- BPS. 2011. Statistik 2008-2011 perdagangan luar negeri Indonesia-impor 2010, Volume I. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik. 602 hlm.
- Dharmayanti NLPI. 2013. Antisipasi dan pengendalian virus Avian Influenza subtipe H5N1. Bahan *Press Conference* Badan Litbang Pertanian (2 Januari 2013).

- Ditjen PKH. 2013. Update perkembangan kasus Avian Influenza (AI) pada unggas kondisi s/d 31 Maret 2013 [internet]. [sitasi 27 Juni 2013]. Ditjennak.deptan.go.id.
- Ditjen PKH. 2012. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2012. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. 210 hlm.
- Ditjen PKH. 2011. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2011. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian. 269 hlm.
- Erabaru News. 2013. Waspada flu burung mengancam di awal tahun [internet]. [sitasi 21 Januari 2013]. <http://erabaru.net/nasional/119-peristiwa/32316-waspada-flu-burung-mengancam-di-awal-tahun>.
- Erabaru News. 2012. Stop impor unggasantisipasi flu burung (21 Januari 2013).
- FAO. 2004. Avian Influenza disease emergency-update on the Avian Influenza situation. News issue No.19. Rome (Ital): FAO, Technical Task Force on Avian Influenza.
- FKH UGM. 2006. Analisis ekonomi program pengendalian Avian Influenza di Jawa. Laporan Penelitian. Yogyakarta (Indonesia): Fakultas Kedokteran Hewan-Universitas Gajah Mada. 180 hlm.
- Gilbert M, Chaitaweesub P, Parakamawongsa T, Premashthira S, Tiensin T, Kalpravidh W, Wagner H, Slingenbergh J. 2006. Free-grazing ducks and highly pathogenic Avian Influenza, Thailand. *Emerg Infect Dis.* 12: 227-234.
- Hewajuli DA. 2012. Waspadailah keberadaan itik dalam penyebaran virus flu burung atau AI. *Sinar Tani*, Edisi 19-25, September 2012 No. 3474 Tahun XLIII, Jakarta (Indonesia): Badan Litbang Pertanian.
- ICASEPS. 2010. Characterization of Two cross-border area of Indonesia in the border with Malaysia for the risk of highly pathogenic Avian Influenza: a socioeconomic perspective. Laporan Kerjasama Penelitian antara FAO dan ICASEPS. Bogor (Indonesia): ICASEPS. 31 p.
- Ilham N, Yusdja Y. 2010. Dampak flu burung terhadap produksi unggas dan kontribusi usaha unggas terhadap pendapatan peternak skala kecil di Indonesia. *JAE* 28:39-68.
- Ilham N, Yusdja Y, Basuno E, Martindah E, Sartika RAD. 2013. Penilaian eco-health terhadap klaster produksi unggas untuk peningkatan kesejahteraan peternak unggas skala kecil. Laporan Kerjasama Penelitian antara Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian bekerjasama dengan International Development Research Centre Canada. Bogor (Indonesia): PSEKP. 192 hlm.
- Ilham N, Iqbal M. 2011. Factors determining farmers' decision on highly pathogenic Avian Influenza vaccination at the small poultry farms in Western Java. *Media Peternakan* 34:219-227.
- Lokuge B, Lokuge K. 2005. Avian Influenza, world trade and WTO rules: the economics of transboundary disease control. Working Paper: January 2005. Canberra (Aust): Australian National University. 20 p.
- Miers H. 2008. Poverty, livelihoods and HPAI-A Review. Mekong team Working Paper No.1. Funded by DFID. 31 p.
- Muryani. 2013. Dampak flu burung terhadap perekonomian: tinjauan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi nasional [disertasi]. [Bogor (Indonesia)]: Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Institut Pertanian Bogor.
- Naipospos TSP. 2013. "Super Flu" Itik [internet]. [sitasi 8 Mei 2013]. Kompas.com.
- Obayelu AE. 2007. Socio-economic analysis of the impacts of Avian Influenza epidemic on households poultry consumption and poultry industry in Nigeria: Empirical investigation of Kwara State. *Livestock Research for Rural Development*. Volume 19, Article: 4. <http://www.lrrd.org/lrrd19/1/obay19004.htm>
- Rusfidra. 2008. Pengembangan ternak itik [internet]. [sitasi 16 Januari 2013]. Universitas Andalas, Padang. http://rusfidra.multiply.com/journal/item/56/pengembangan_itik/
- Sariozkan S, Yalcin C, Cevger Y, Aral Y, Sipahi C. 2009. The financial impacts of the Avian Influenza outbreaks on Turkish table egg producers. *World's Poult Sci J.* 65:91-96.
- Smith, S. 2005. The economic and social impact of Avian Influenza [internet]. [sitasi 8 Mei 2013]. http://www.avian_influenza.org/economic-social-impacts-avian-influenza.php.
- Tono. 2012. Merebaknya kembali flu burung [internet]. [sitasi 28 Juni 2013]. Id.voi.co.id.
- You L, Diao X. 2007. Assessing the potential impactnof Avian Influenza on poultry in West Africa: a spatial equilibrium analysis. *J Agr Econ.* 58:348-367.
- Yusdja Y, Sayuti R, Sejati WK, Anugerah IS, Sadikin I, Winarso B. 2005. Pengembangan model kelembagaan agribisnis unggas tradisional (ayam buras, itik dan puyuh). Laporan Penelitian. Bogor (Indonesia): PSEKP. 360 hlm.